

**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
PERSATUAN
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
BUDAYA NASIONAL**

Oleh: Rizal Mustansyir

Pendahuluan

Perbincangan mengenai budaya nasional di Indonesia, tidak bisa terlepas dari eksistensi bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan pada proses *becoming* (menjadi). Budaya nasional bukan barang jadi, melainkan selalu dalam proses "menjadi" melalui dinamika kehidupan bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar suku, antar bangsa dan pergumulan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak awal pergerakan nasional yang ditandai dengan munculnya Budi Utomo (1908), bangsa Indonesia mencoba meredakan setiap konflik yang mungkin timbul, yang kiranya dapat mengganggu pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemungkinan timbulnya konflik pada masa itu lebih banyak disebabkan semangat primordialisme yang berlebih-lebihan. Semangat sumpah pemuda 28 Oktober 1928 merupakan salah satu momentum untuk meredakan konflik yang dapat ditimbulkan oleh sikap primordialistik yang sempit.

Keanekaragaman adat istiadat, budaya dan agama di Indonesia ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun tidak berarti bahwa keanekaragaman itu sendiri merupakan satu-satunya pemicu timbulnya konflik. Konflik itu lebih banyak ditimbulkan oleh sikap tertutupan dalam bentuk membesar-besarkan rasa kedaerahan, kesukuan, keagamaan. Keterbukaan dalam bentuk kemauan menjalin komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya akan menciptakan suatu situasi dan kondisi harmonis. Di sinilah budaya nasional seharusnya mampu berperan sebagai wadah pemersatu atau wahana dialog untuk menembus tertutupan masing-masing daerah.

Di samping itu budaya nasional tidak lagi terkungkung dalam relasi antar daerah, melainkan meluas pada relasi antar bangsa. Inkulturasi dan akulturasi budaya ikut mewarnai corak budaya nasional. Di sinilah diperlukannya alat pemersatu bangsa yang sungguh-sungguh dapat

menjaga karakteristik bangsa, namun tidak sampai menjadikan bangsa terkurung pada wawasan sempit yang bercorak *chauvinisme*. Di sinilah Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu bangsa yang menjadi wadah bagi keberagaman etnis di Indonesia, karena diangkat dari ragam pengalaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu makalah ini akan menelusuri masalah budaya di Indonesia.

I. Masalah Budaya Di Indonesia

Budaya nasional merupakan salah satu masalah crucial di Indonesia, karena bangsa Indonesia terdiri atas multi etnik dengan berbagai adat istiadat, budaya dan agama. Apabila berbicara tentang budaya nasional, maka tidak dapat dipisahkan dari perbincangan mengenai kedudukan suatu bangsa yang secara *de facto* dan *de jure* memiliki kemerdekaan secara politik, hidup dalam suatu wilayah kekuasaan sendiri dan memiliki pemerintahan yang otonom. Berbicara tentang budaya di Indonesia berarti mengurai kemajemukan atau keberagaman sebagai salah satu karakteristik yang ada.

Budaya nasional cukup mendapat perhatian dari para pendiri negara, karena mereka menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beranekaragam suku bangsa. Oleh karena itu dalam pasal 32 UUD 1945 disebutkan bahwa kebudayaan nasional ialah kebudayaan yang didasarkan atas kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di seluruh Indonesia, serta berkembang sepanjang sejarah. Kebudayaan nasional dipandang sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Unsur-unsur kebudayaan dari luar diterima, sejauh tidak bertentangan dengan budaya nasional, untuk memperkaya kebudayaan nasional itu sendiri.

Kemungkinan timbulnya konflik di antara budaya-budaya daerah memang masih terbuka, namun tidak berarti jalan keluar untuk mengatasinya sudah buntu. Kunci utama untuk mengatasi konflik antar budaya daerah itu dapat dilakukan melalui pencarian simbol yang dapat mempersatukan keberagaman itu ke dalam kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang menampung keanekaan dalam keikaan, keberagaman dalam kesatuan. Ruang gerak antara keberagaman dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu harmoni, saling melengkapi. Eka Dharmaputera (1992) merumuskan konsep harmoni sebagai dunia yang stabil berdasarkan konflik atau sebagai teori mengendalikan konflik. Konflik dilihat sebagai isi keserasian, bukannya sebagai lawan. Konflik harus dijinakkan. Keserasian dan keselarasan bukanlah ketika konflik diatasi dengan memperoleh sintese yang lebih tinggi, tetapi ketika konflik sedapat mungkin dihindari.

Hardono Hadi (1993) memandang tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai kondensasi dari seluruh makna yang termuat dalam lambang negara Indonesia. Kenyataan sebagai satu bangsa yang terdiri dari beranekaragam adalah hal yang paling mendasar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Oleh karena itu makna kesatuan dari keanekaragaman harus dicari sumber dan muaranya. Ia merupakan semboyan atau pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang begitu kompleks. Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupan tidak dilihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi justru keanekaragaman itu diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.

Dengan demikian masalah budaya di Indonesia dapat diibaratkan dengan sebuah mata uang pada kedua belah sisinya. Kesatuan tidak mungkin ada tanpa keanekaragaman, sebaliknya keanekaragaman memerlukan kesatuan sebagai pembentuk opini.

II. Masalah Nasionalisme

Pembahasan mengenai nasionalisme dapat dipahami secara jernih apabila dimengerti apa yang dimaksud dengan bangsa (nasion). Bangsa (nasion) menurut Renan didefinisikan sebagai berikut:

"suatu jiwa, suatu asas spiritual. Suatu nasion adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Suatu nasion dianggap mempunyai suatu masa lampau; akan tetapi ia melanjutkan dirinya dalam masa sekarang ini dengan suatu kenyataan yang jelas; persetujuan, keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama (Hans Kohn, 1965: 135).

Otto Bauer mendefinisikan bangsa sebagai suatu kesatuan peragai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat. Nasionalisme ialah suatu iktikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa (Soekarno, 1963: 3)

Enciclopedia Brasileira Merito edisi terbaru menyebutkan bahwa bangsa adalah komunitas warganegara dari suatu negara, hidup di bawah rejim atau pemerintahan yang sama dan mempunyai suatu kepentingan-kepentingan bersama; kolektivitas dari penduduk di suatu wilayah dengan tradisi, aspirasi dan kepentingan bersama, dan tunduk di

bawah suatu kekuatan pusat yang bertugas mempertahankan kesatuan dari kelompok tersebut (Hobsbawm, 1993: 18).

Dhaniel Dhakidae (1986: 70) mengatakan bahwa nasionalisme merupakan ekspresi hubungan antara darah dan tanah. Ia melihat nasionalisme sebagai suatu proses yang dalam dirinya terikat pada suatu situasi historis. Nasionalisme adalah sebuah ideologi dalam pengertian seperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku dan perbuatan. Nasionalisme dalam pengertian ini menurut Dhaniel, mempunyai dinamika dalam dialektika tersendiri. Karena itu dalam setiap kurun waktu, setiap generasi, nasionalisme itu muncul dalam dimensi yang khas. Sebelum penjajahan (masa pra kemerdekaan), nasionalisme tampil sebagai ideologi penantang dalam dimensi kesatuan dan persatuan dialektis untuk mengusir penjajahan. Masa sesudah kemerdekaan (pasca kemerdekaan), nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi kolonial. Ancaman terhadap nasionalisme dalam kurun waktu pasca kemerdekaan ini adalah gurita raksasa ekonomi yang melilit kehidupan bangsa-bangsa di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Nasionalisme atau kesadaran nasional (*National Bewustzijn*) merupakan kunci utama untuk mengatasi keberagaman adat istiadat, budaya dan agama yang ada di Indonesia. Tanpa nasionalisme sebagai alat pemersatu, sulit sekali untuk mencari titik temu dari berbagai kebiasaan yang berasal dari multi etnik. Nasionalisme dalam hal ini dapat dipandang sebagai komitmen moral bangsa Indonesia untuk tidak memandang perbedaan itu sebagai konflik, melainkan sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak, juga sebagai kekayaan yang penuh dengan dinamika hidup. Sartono (1992) mengemukakan lima prinsip yang selalu termuat dalam nasionalisme, yaitu:

Pertama, kesatuan atau persatuan (unity) dalam arti kesatuan ini dinyatakan sebagai *conditio sine qua non*, syarat yang tak dapat ditolak. Kedua, kebebasan (liberty) dalam arti masyarakat atau warganegara memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat demi terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Namun kebebasan itu tidak sampai mengorbankan ketertiban umum. Ketiga, kesamaan (equity) dalam arti kesamaan hak dan kewajiban serta kesamaan memperoleh kesempatan seperti: pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kesamaan yang demikian itu mengandaikan adanya peluang yang terbuka bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing.

Keempat, kepribadian (personality) dalam arti setiap bangsa memiliki karakteristik sesuai dengan pengalaman budaya dan sejarahnya. Kepribadian mengacu pada karakteristik yang mencerminkan ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri

khas ini dibangun atas dasar persamaan nasib, sehingga tercipta jatidiri bangsa (*national identity*). Kelima, prestasi (*performance*) dalam arti nilai atau kualitas yang diperlihatkan dalam suatu tindakan sehingga menimbulkan kekaguman pada bangsa lain. Sebagai contoh: industri pesawat terbang nusantara (IPTN) yang dipimpin oleh Habibie memiliki prestasi dan reputasi internasional yang mengundang kekaguman bangsa lain terhadap prestasi bangsa Indonesia di bidang teknologi pesawat terbang.

Kelima prinsip nasionalisme ini saling terkait satu sama lain dalam membentuk wawasan dan kesadaran nasional.

III. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERSATUAN

Soerjanto (1992) menunjukkan salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Soerjanto (1992) dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia mensinyalir bahwa kondisi masyarakat Indonesia sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multi etnik, multi religius dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur ini merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya ia juga melihat bahwa kemajemukan itu dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan serta perselisihan. Oleh karena itu ia menilai proses hubungan sosial perlu diusahakan agar berjalan secara sentripetal, agar terjadi seperti semboyan perjuangan: *'Samenbundeling van alle Krachten'*. Disini persatuan atau kesatuan memegang peranan yang sangat penting

Harsya Bahtiar (1980) mengatakan bahwa untuk membina rasa kebangsaan dapat ditempuh melalui hirarki sibernetika yang menggambarkan hubungan antar sistem yakni budaya, sosial, kepribadian, organik. Sistem budaya nasional Indonesia terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang dianut bersama; nilai-nilai yang digunakan bersama sebagai pedoman umum dalam tingkah laku seperti nilai-nilai Pancasila, serta berbagai simbol yang digunakan dalam mengungkapkan perasaan. Sistem sosial merupakan perwujudan hubungan solidaritas antar warganegara. Kelompok-kelompok sosial ini terdapat dalam berbagai bidang kegiatan seperti: kegiatan agama, pendidikan, ekonomi, politik, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Sistem Kepribadian terwujud sebagai pola-pola persepsi, perasaan, dan penilaian yang dianggap merupakan pola-pola keindonesiaan yakni,

identitas diri orang yang bersangkutan yang menganggap dirinya orang Indonesia. Seseorang yang sungguh-sungguh menganggap dirinya orang Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan unsur-unsur kepribadian keindonesiaan lebih daripada unsur-unsur kepribadian daerah atau asing. Sistem organik atau jasmaniah dalam arti kesatuan nasional tidak didasarkan atas persamaan ras, meskipun persamaan ras dapat mempengaruhi kesatuan. Sebab sulit sekali untuk mengidentifikasi (menengarai) asli atau tidaknya seseorang (Harsya Bahtiar, 1980: 24).

IV. Pancasila Sebagai Strategi Pengembangan Budaya Nasional

Pancasila sebagai ideologi pemersatu sudah diakui dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Namun yang lebih penting dalam era globalisasi sekarang ini adalah meningkatkan peran Pancasila sebagai strategi pengembangan budaya nasional. Sebab bangsa Indonesia yang sudah memiliki wawasan kebangsaan tidak cukup berpuas diri karena berhasil mengatasi problem-problem intern, melainkan harus mengarahkan perhatian pada problem-problem eksternal berupa pengaruh budaya dari luar. Setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai yang diabstraksi dari pengalaman hidup bangsa Indonesia. Pengalaman hidup ini harus benar-benar teruji dalam sejarah perjalanan bangsa yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan Pancasila yang diangkat dari pengalaman sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

Setiap sila Pancasila memberi inspirasi, dasar dinamika dan vitalitas kehidupan bagi bangsa Indonesia, karena masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang bisa dipertanggung-jawabkan baik secara moral maupun secara kultural.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wahana bagi berbagai agama yang tumbuh berkembang di Indonesia. Kata Yang Maha Esa merupakan tolok ukur yang digariskan bagi penarikan garis batas yang tegas antara agama yang diakui dengan agama yang tidak diakui, yakni penekanan pada aspek keesaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dimaksudkan untuk menampung ide-ide kemanusiaan (humanity) yang dikembangkan di Indonesia dalam wawasan yang bersifat universal. Sila Persatuan Indonesia (nasionalisme) dimaksudkan untuk mengikat keberagaman dalam kesatuan yang kokoh, sehingga konflik berubah menjadi rahmat. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (demokrasi) merupakan salah satu karakteristik yang coba digariskan untuk membedakan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi lain (misalnya demokrasi liberal). Demokrasi Pancasila lebih menekankan pada segi musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan didasarkan atas voting, walaupun tidak mengingkarinya sama sekali. Sila Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita yang digariskan oleh para pendiri negara. Keadilan sebagai titik omega atau cita-cita ideal mengandung dimensi moral yang memerlukan perjuangan terus menerus, tanpa mengenal titik henti.

V. PENUTUP

Bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang unik yang tercermin melalui Pancasila sebagai ideologi persatuan. Kekuatan Pancasila sebagai ideologi persatuan diwujudkan dalam kemampuannya untuk menggalang semangat nasionalisme dan semangat persatuan diantara keberagaman suku bangsa, multi etnik yang ada di Indonesia. Situasi dan kondisi yang selalu berkembang membentuk jatidiri budaya nasional sejak pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Tantangan terhadap budaya nasional dalam era pasca kemerdekaan adalah perkembangan iptek yang melanda seluruh penjuru dunia. Arus perkembangan yang kuat ini ikut pula mempengaruhi pola pikir dan pola pandang bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi persatuan selalu relevan untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daoed Joesoef, 1991, "Satu Kebudayaan Di Abad Iptek", dalam **KEBUDAYAAN**, Nomor 01 Tahun 1 1991/1992, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Dhaniel Dhakidae, 1986, "Nasionalisme Dalam Proses Mencari Art", dalam **Menguak Mitos-Mitos Pembangunan**, editor: M. Sastraprateja, J.Riberu dan Frans M. Parera, Gramedia, Jakarta.
- Eka Dharmaputera, 1992, **Pancasila Identitas Dan Modernitas**, BPK Gunung Mulia, Cetakan ke-4, Jakarta.
- Hardono Hadi, 1993, **Epistemologi Pancasila**, Diklat Kuliah Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harsya W.Bachtiar, 1980, "Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kebudayaan dan Masalah Kesatuan Bangsa Indonesia", dalam **KEBUDAYAAN**, Nomor 1 Tahun 1 1980/1981, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Hobsbaum, E.J., 1992, **Nasionalisme Menjelang Abad XXI**, Penerjemah: Hartian Silawati, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Pranarka, AMW., 1985, **Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila**, CSIS, Jakarta.
- Sartono, 1992, **Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia**, Diklat Kuliah Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soerjanto, P., 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam **Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka**, BP-7 Pusat, Jakarta.